

Abstrak

Perjanjian merupakan suatu hal yang krusial pada perikatan. Perjanjian dapat berjalan dengan baik jika perjanjian tersebut juga berlandaskan pada itikad baik (good faith), namun jika terdapat pihak yang tidak menjalankan itikad baik termasuk tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban maka dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi. Dalam putusan MA RI Nomor 519/Pdt.G/2018/PN. Jkt Tmr kesepakatan antara PT. Mitra Makmur Sejati Utama Logistik dengan PT. Asuransi Himalaya Pelindung, dimana kesepakatan tersebut tertuang dalam polis dengan Nomor : 10280311150800025-000059 yang mulai efektif berlaku pada tanggal 2 Juni 2016 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 2.580.971.000, beserta dengan semua addendum-addendumnya. PT. Asuransi Himalaya Pelindung telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) yang dimana biasanya perusahaan asuransi merupakan pihak yang diuntungkan dengan klausula-klausula eksonerasi yang sangat berpihak kepadanya, namun PT. Asuransi Himalaya Pelindung ini justru melakukan perbuatan wanprestasi. Bahwa Asuransi yang dimaksud adalah Asuransi terhadap Kendaraan Mobil Truk dengan nomor polisi B 9755 UYU dan truk dengan nomor polisi B 9828 UYU. Tujuan dari asuransi ini adalah untuk meringankan beban resiko yang dihadapi oleh tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung sedemikian rupa, Pada perjanjian ini pihak penggugat mengalami perampokan pada kendaraan yang telah diasuransikan dalam perjanjian ini tetapi dalam hal ini pihak tergugat melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melakukan kewajibannya sebagai pihak penanggung, disebutkan dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa “ suatu pertanggungan dapat diadakan untuk harga penuh dari barang-barang yang dipertanggungkan”, maka dalam hal tersebut kewajiban pihak penanggung dapat mengganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak tertanggung, Mengenai putusan itu unsur-unsur wanprestasi (biaya, rugi, bunga) yang tidak terbukti sama halnya dengan yang terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata dimana pihak penjual dalam hal ini sudah jelas-jelas lalai dan tidak memiliki itikad baik (melanggar ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan sumber kepustakaan atau bahan skunder yang dikumpulkan untuk diteliti dan dianalisa.

Kata-kata Kunci: Wanprestasi, Polis Asuransi, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 519/PDT.G/2018/PN. JKT TMR

Abstract

The agreement is a crucial thing in the engagement. The agreement can run well if the agreement is also based on good faith, but if there are parties who do not carry out good faith including not carrying out their obligations, it can be said as an act of default. In the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 519/Pdt.G/2018/PN. Jkt Tmr agreement between PT. Mitra Makmur Sejati Utama Logistics with PT. Himalayan Insurance Protector, where the agreement is contained in a policy with Number: 10280311150800025-000059 which became effective on June 2, 2016 with a sum insured of Rp. 2,580,971,000, together with all its addendums. PT. Himalayan Insurance Protector has committed acts of default (breach of promise) where usually the insurance company is the beneficiary party with exoneration clauses that are very in favor of him, but PT. Himalayan Insurance Protector is actually doing the act of default. That the insurance referred to is Insurance for Car Truck Vehicles with police number B 9755 UYU and trucks with police number B 9828 UYU. The purpose of this insurance is to ease the burden of risk faced by the insured by obtaining compensation from the insurer in such a way, In this agreement the plaintiff experiences a robbery on the vehicle that has been insured in this agreement but in this case the defendant commits a default because it does not carry out its obligations as the insurer, it is stated in Article 289 of the Commercial Code that "an insurance can be provided for the full price of the goods insured", then in that case the obligation of the insurer can compensate for the losses suffered by the insured party. The decision contains elements of default (costs, losses, interest) that are not proven, as is the case with Article 1243 of the Civil Code where the seller in this case is clearly negligent and has no good faith (violating the provisions of Article 1338 paragraph 3 of the Civil Code). Civil Law Types of research is used by the author, namely using a normative juridical legal research method. Normative juridical law research is research that uses library sources or secondary materials collected for research and analysis.

Keywords: Default, Insurance Policy, Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 519/PDT.G/2018/PN. JKT TMR